

**PENGGELOPAN PAJAK OLEH NOTARIS/PPAT  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**TESIS**

Diajukan sebagai syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum



Oleh

**WINARDI**  
**NIM : 322013035**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA  
SALATIGA  
2016**





## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winardi  
NIM : 322013035 Email : winardi\_sh@yahoo.co.id  
Fakultas : Hukum Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul tugas akhir : Penggelapan Pajak Oleh Notaris/PPAT Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi  
Pembimbing : 1. Dr. Tri Budiyo, S.H., M.Hum.  
2. Dr. M. Haryanto, S.H., M.Hum.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Kristen Satya Wacana maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Satya Wacana.

Salatiga, 30 Agustus 2016



Winardi







## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winardi  
NIM : 322013035 Email : winardi\_sh@yahoo.co.id  
Fakultas : Hukum Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tugas akhir : Penggelapan Pajak Oleh Notaris/PPAT Ditinjau Dari  
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Dengan ini saya menyerahkan hak *non-eksklusif*\* kepada Perpustakaan Universitas – Universitas Kristen Satya Wacana untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak yang sesuai):

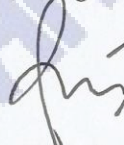
- ☒ a. Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA
- ☐ b. Saya tidak mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA\*\*

\* Hak yang tidak terbatas hanya bagi satu pihak saja. Pengajar, peneliti, dan mahasiswa yang menyerahkan hak *non-eksklusif* kepada Repositori Perpustakaan Universitas saat mengumpulkan hasil karya mereka masih memiliki hak *copyright* atas karya tersebut.

\*\* Hanya akan menampilkan halaman judul dan abstrak. Pilihan ini harus dilampiri dengan penjelasan/ alasan tertulis dari pembimbing TA dan diketahui oleh pimpinan fakultas (dekan/kaprodi).

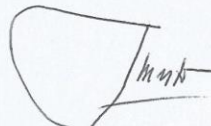
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Salatiga, 30 Agustus 2016

  
Winardi

Mengetahui,

  
Dr. Tri Budiyo, S.H., M.Hum.

  
Dr. M. Haryanto, S.H., M.Hum.



**Lembar Persetujuan**

**PENGGELOMPOKAN PAJAK OLEH NOTARIS/PPAT  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**TESIS**



Disusun Oleh

**WINARDI**  
**NIM : 322013035**

Telah Disetujui Untuk Diuji :

Tanggal 26, Bulan Agustus, Tahun 2016.

**Pembimbing I**

**Dr. Tri Budiyono, S.H., M.Hum**

**Pembimbing II**

**Dr. M. Haryanto, S.H., M.Hum.**





**Lembar Pengesahan**

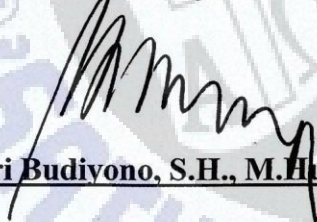
**PENGSELAPAN PAJAK OLEH NOTARIS/PPAT  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**WINARDI**  
**NIM : 322013035**

Program Studi Magister Ilmu Hukum

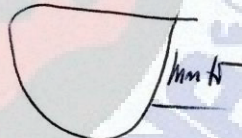
Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Tri Budiyono, S.H., M.Hum


Pembimbing II



Dr. M. Haryanto, S.H., M.Hum.

Mengesahkan

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Umbu Ranta, S.H., M.Hum.



## **Pernyataan Orisinalitas**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winardi  
NPM : 322013035  
Judul Tesis : Penggelapan Pajak Oleh Notaris/PPAT Ditinjau Dari  
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa dalam menulis Tesis yang berjudul “Penggelapan Pajak Oleh Notaris/PPAT Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”, tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih sebagian atau seluruh karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia dicabut hak saya sebagai lulusan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UKSW atau dicabut gelar yang telah diberikan serta akibat hukum lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun.

Salatiga, 23 Agustus 2016.

**Winardi**



## Ucapan Terima Kasih

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Keluargaku tersayang, isteri tercinta Arifah S. Maspeke, S.Ag., serta anak-anakku Difah Putri Salsabilah, M. Rafli Erlangga, Alisha Aska Shakila yang telah memberikan doa serta dukungan untuk menyelesaikan Tesis ini.
2. Dr. Tri Budiyo, S.H., M.Hum sebagai Pembimbing yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.
3. Bapak Dr. M. Haryanto, S.H., M.Hum, selaku pembimbing yang telah memberikan masukan-masukan yang berarti.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum UKSW yang telah berkenan memberikan pengetahuan selama penulis menjalani masa perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu staf pegawai Fakultas Hukum UKSW yang telah memberikan banyak kemudahan dan dukungan dalam masa perkuliahan.
6. Pimpinan pada Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, khususnya KOMBES POL. Drs. Edhy Moestofa, M.H. (Dirreskrimsus); AKBP Harryo Sugihartono, S.IK., M.H. (Wadirkrimsus); AKBP Eggy Adrian Suez, S.IK., S.H., M.H.



(Kasubdit III, Tipikor); KOMPOL Marsudi Raharjo, S.H., M.H. (Kanit 4 Subdit III, TIPIKOR) yang telah mengizinkan penulis untuk melanjutkan studi dan memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.

7. Teman-teman di Kepolisian Daerah Jawa Tengah, khususnya di Direktorat Kriminal Khusus yang telah memberikan dorongan kepada penulis di dalam studi serta penyelesaian penulisan Tesis ini.
8. Teman-teman angkatan penulis di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UKSW dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala dukungannya.

Semoga dengan terselesaikannya Tesis ini dapat berguna bagi penelitian di masa depan, khususnya bagi perkembangan kemajuan Ilmu Hukum.

Salatiga, Agustus 2016.

**Winardi**

## Kata Pengantar

Tesis ini berjudul Penggelapan Pajak Oleh Notaris/PPAT Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sesuai dengan judulnya, yang dibahas di dalam tesis ini bahwa tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh seorang Notaris/PPAT masuk dalam kategori tidak pidana korupsi.

Untuk memperjelas maksud dari penulis sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penulisan Tesis ini dibagi dalam empat Bab utama yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan yang terakhir adalah Bab IV Penutup.

Bab I yaitu **Pendahuluan**, di dalamnya akan dikemukakan latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, dan Metode Penelitian

Bab II **Tinjauan Pustaka**, pada bab ini akan dikemukakan konsep perpajakan serta kedudukan pajak dalam keuangan negara, serta akan dikemukakan juga konsep tindak pidana penggelapan dan konsep tindak pidana korupsi disertai dengan pemenuhan unsur-unsur dalam kedua konsep tersebut.

Bab III **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**, pada bab ini berisi tentang kasus posisi dari studi kasus penelitian, bagaimana tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh Notaris/PPAT akan memenuhi unsur sebagai tindak pidana korupsi ditinjau dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Bab IV **Penutup**, berisi tentang Kesimpulan dari penelitian ini dan bagaimana saran untuk pemikiran dunia hukum kedepannya.



## Abstraksi

Penelitian ini berjudul Penggelapan Pajak Oleh Notaris/PPAT Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Fokus penelitian ini adalah tindakan penggelapan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan atau BPHTB yang dilakukan oleh Notaris/PPAT. BPHTB adalah masuk dalam kategori keuangan negara. Masuknya BPHTB ke dalam kategori keuangan negara pada saat terjadinya peralihan hak atas tanah atau setelah adanya *taatsbestand*, sehingga tindakan seorang notaris /PPAT yang tidak menyetorkan uang BPHTB ke Kas negara adalah tindakan penggelapan uang negara yang mengakibatkan kerugian pada keuangan negara maka dari itu tindakan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: **Pajak, Penggelapan, Korupsi.**





## Daftar Isi

<b>Lembar Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Pernyataan Tidak Plagiat.....</b>	<b>iii</b>
<b>Pernyataan Persetujuan Akses .....</b>	<b>v</b>
<b>Lembar Persetujuan .....</b>	<b>vii</b>
<b>Lembar Pengesahan.....</b>	<b>ix</b>
<b>Pernyataan Orisinalitas .....</b>	<b>xi</b>
<b>Ucapan Terima Kasih.....</b>	<b>xii</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>xv</b>
<b>Abstraksi .....</b>	<b>xvii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>xviii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
1. Manfaat Teoritis.....	14
2. Manfaat Praktis.....	14
E. Kerangka Teori .....	15
1. Teori Timbulnya Hutang Pajak.....	16
2. Teori Kewenangan PPAT .....	27
F. Metode Penelitian .....	38
1. Jenis Penelitian .....	39
2. Metode Pendekatan.....	39
3. Jenis Data dan Sumber.....	41
4. Teknik Pengumpulan Data.....	43
5. Metode Analisa Data .....	44
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	 <b>45</b>
A. Tinjauan Tentang Perpajakan .....	45

1. Pengertian Pajak.....	45
2. Asas - Asas dan Syarat - Syarat Pemungutan Pajak.....	48
B. Pengertian, Subjek dan Objek BPHTB .....	55
1. Pengertian BPHTB.....	55
2. Subjek dan Objek BPHTB .....	56
3. Dasar Perhitungan BPHTB .....	59
C. Kewajiban Pendaftaran Jual Beli Tanah .....	65
D. Hutang Pajak Sebagai Keuangan Negara.....	67
E. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Korupsi.....	70
1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana.....	70
2. Konsep Tindak Pidana Penggelapan.....	73
3. Konsep Tindak Pidana Korupsi .....	81
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>86</b>
A. Kasus Posisi .....	86
1. Kronologi Kasus .....	86
2. Hasil Penyidikan.....	89
B. Analisis Tidak Disetorkan Uang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dalam kategori sebagai Tindak Pidana Korupsi .....	95
1. Dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Penggelapan uang pajak pada proses peralihan hak atas jual beli tanah dan bangunan .....	95
2. Kewenangan PPAT dikaitkan dengan Uang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Sebagai Uang Negara dan Tindak Pidana Korupsi.....	100
C. Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Korupsi Pada Penyimpangan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB).....	122
1. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ....	133
2. Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	141
3. Pasal 9 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	146

4. Pasal 15 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ....	150
5. Pasal 88 KUHP .....	155
6. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP .....	158
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>167</b>
A. Kesimpulan .....	167
B. Saran .....	168
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>171</b>
A. Buku .....	171
B. Peraturan Perundang-undangan .....	175
C. Jurisprudensi .....	176
D. Website .....	176



**PENGGELOMPOKAN PAJAK OLEH NOTARIS/PPAT  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Winardi**

